

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA SECARA BERSAMA-SAMA (studi kasus putusan nomor.165/pid.sus/2012/PN.Makale)



Oleh

SARTONO NUR SAID

B111 09 995

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN NARKOTIKA SECARA BERSAMA-SAMA
(studi kasus putusan nomor 165/pid.sus/2012/PN.Makale)**

Oleh

SARTONO NUR SAID

B111 09 995

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 165/Pid.sus/2012/PN.Makale)

Disusun dan diajukan oleh

**SARTONO NUR SAID
B 111 09 995**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

NIP. 19660320 199103 1 005

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

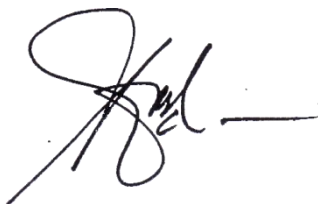
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **SARTONO NUR SAID**
Nomor Induk : **B 111 09 995**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN NARKOTIKA SECARA BERSAMA-
SAMA. (Studi Kasus Putusan Nomor
165/pid.sus/2012/PN.MAKALE)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2013

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, SH.
NIP. 196603201991031005

ABSTRAK

SARTONO NUR SAID (B111 09 995), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana pengedaran Narkotika Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 165/pid.sus/2012/PN.Makale)”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar, selaku pembimbing pertama dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika secara bersama-sama pada perkara nomor: 165/pid.sus/2012/PN.Makale. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pengedaran narkotika secara bersama-sama pada perkara nomor: 165/pid.sus/2012/PN.Makale.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makale Kab. Tana Toraja, yakni Pengadilan Negeri Makale dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara membaca dokumen atau peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa (1) penerapan hukum pidana pada perkara nomor: 165/pid.sus/2012/PN.Makale, majelis hakim Pengadilan Negeri Makale menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 juga diatur mengenai pidana ganda/akumulasi, yakni pada pasal 111 sampai pasal 127. (2) Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor: 165/pid.sus/2012/PN.Makale adalah dilihat dari dakwaan Penuntut Umum.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT.

Karena atas petunjuk serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan. Juga berkat bimbingan-Nya pula sehingga dalam proses penulisan skripsi ini, berarti rintangan, baik fisik maupun mental berhasil diatasi dengan sebaik-baiknya oleh penulis.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Dalam kesempatan ini, ijinilah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ayahanda Muhammad Nur Said atas segala kasih sayang, bimbingan dan pengorbanan yang tak putus-putusnya, dan ibunda tercinta Dewi Sulihin yang telah membesarkan serta mencurahkan segala perhatian

dan kasih sayangnya kepada penulis, serta saudara-saudaraku Sartika Nur Said, Suhardiman Nur Said, Suhardinata Nur Said yang telah member dorongan dan semangat yang besar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak **Prof.Dr.dr. Idrus A. Paturisi** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor.
3. Bapak **Prof.Dr. Aswanto,S.H.,M.S.,DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.** dan Bapak **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.** selaku penguji I, Bapak **Prof.Dr. H.M.Said Karim, SH.,M.H.** selaku penguji II, Bapak **Dr. Amir Ilyas SH.,M.H.** selaku penguji III.
6. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak **Donald Everly Malubaya S.H.** dan seluruh hakim serta para staf Pengadilan Negeri Makale, atas segala bantuan kepada penulis karena sudah menjadi narasumber yang baik dan pengertian.
8. Teman-teman Green Island Basket Ball (GIB).
9. Buat sahabat-sahabat tercinta Hidayatullah, Andi Putra Kusuma, M. M. Resa Prasetya, Ilham, Zaldi, Ali khan, Ismail, Andi Dedy S.H.,

Hardianto Maspul S.H., Hartono Tasir, Akbar Tenri, Bagus Panji S.H., Aan Pratama Hikman S.H., Aditya Toding S.H., Fadil, Muhammad Medias, Aldiwin Yunus, Muchsin, Budi Satria, M. Ilyas, A. Ishaq, Husain Mandala, Harry Ashary, Arsel Mangontan S.H., Fihara, Yusida, Umaerah, Kiki, Tisa, Cindy Astrid, Suhaeni Rosa S.H., Vita Haya S.H., Surya Ningsih S.H., Teten Susmihara S.H., lin Fatimah S.H., Alfy Alimuddin S.H., yang tak hentinya memberi dukungan secara moral untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Adik-adik Junior Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mulai angkatan 2010, 2011, 2012, dan 2013.

11. Semua teman-teman yang tidak sempat dituliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun tetap berharap dapat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan semua yang sempat membaca skripsi ini umumnya.

Makassar, 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	ii
i	
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	7
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	18
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	18
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	34
C. Unsur Tindak Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.....	41
D. Penyertaan	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	53
B. Jenis dan Sumber Data	53
C. Jenis penelitian	54
E. Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum dalam Perkara nomor 165/pid.sus/2012/PN.Makale	55
B. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan dalam Perkara nomor 165/pid.sus./2012/PN.Makale.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan di dalam setiap segi, baik di bidang politik, bidang ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan negeri ini.

Penegakan supremasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah peraturan perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan harus diperhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan,

baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

(Sudarsono, 1991: 20)

Salah satu faktor pendorong adanya kepatuhan dan ketaatan individu pada hukum tidak lain karena adanya sanksi sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana hukum dapat mengikat tanpa sanksi, apakah berlaku efektif atau malah sebaliknya. Hukum pidana misalnya yang memiliki stelsel hukum yang berbeda dengan bidang hukum lainnya yang lebih mendasarkan sanksinya pada sanksi fisik juga menimbulkan pro dan kontra terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, baik dikalangan praktisi hukum maupun akademisi hukum itu sendiri, terlebih lagi dikalangan masyarakat pencari keadilan.

Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dipersoalkan pada berat ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat dari sanksi pidana itu sendiri dan seberapa besar pengaruh sanksi pidana yang dikenakan itu dapat merubah perilaku jahat atau membuat terpidana menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya. Sejak tahun 1976, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Kemudian pada tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun seiring perkembangan zaman dimana tindak pidana Narkotika makin marak, maka pemerintah Indonesia kemudian merevisi undang-undang Nomor

22 Tahun 1997 dianggap sudah ketinggalan melalui undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari pemakaian yang berlebihan serta berulang-ulang ini dan tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotika tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Bahaya dari narkotika ini telah menjadi perhatian banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan korban penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda dan oleh karena itu penanggulangan narkotika mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, mengingat dampak yang ditimbulkan

sangatlah luas dan secara perlahan akan mengantarkan bangsa ini kepada gerbang kehancuran. Keseriusann pemerintah dalam hal ini dapat kita lihat secara jelas dimana para pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dijerat dengan menggunakan kitab undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dianggap perlu sebagai tindak lanjut dari penanggulangan bahaya narkoba yang secara umum dapat mengancam ketertiban umum dan mengganggu keamanan yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan nasional. (O.C Kaligis, 2002: 7)

Berdasarkan salah satu asas hukum yang dijadikan sebagai acuan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, yakni *Lex Specilis Derogat Legi Generale*, maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkoba digunakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sifatnya lebih khusus. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba adalah dengan mencari dan membasmi asal muasal atau yang memproduksi barang tersebut sehingga para pemakainya kesulitan untuk mendapatkan Narkoba itu.

Penerapan pidana akumulasi dalam tindak pidana Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu

pada Pasal 111 sampai dengan

127. Dalam Pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal di atas, maka pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan penjatuhan pidana pokok secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu, penerapan pidana pokok secara kumulatif dimaksudkan sebagai efek jera bagi para produsen, penyuplai, dan pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan narkotika tersebut. Tetapi ternyata dalam kenyataannya, banyak pelaku tindak pidana narkotika dan masyarakat secara umum tidak merasa jera dengan beratnya ancaman sanksinya karena ternyata banyak putusan hakim yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan atau keuntungan yang diperoleh dari peredaran narkotika. (Satjipto Raharjo, 2009: 111)

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika pelaku tindak pidana narkotika semakin hari semakin meningkat dan bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Secara Bersama-sama” adalah karena Penulis ingin mengkaji penerapan hukum pada Nomor 165/Pid.Sus/2012/PN.MKL.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika secara bersama-sama dalam perkara putusan No.165/Pid.Sus/2012/PN.MKL?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pengedaran narkotika secara bersama-sama dalam perkara No.165/Pid.Sus/2012/PN.MKL?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika secara bersama-sama pada putusan No.165/Pid.Sus/2012/PN.MKL.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pengedaran narkotika secara bersama-sama pada putusan No.165/Pid.Sus/2012/PN.MKL.

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I. Di samping itu dapat menjadi bahan acuan bagi yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut.
2. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I. Selain itu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Amir Ilyas, 2012: 19) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dan ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah :

1. **STRAFBAAR FEIT** adalah peristiwa Pidana,
2. **STRAFBARE HANDLUNG** diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

3. **CRIMINAL ACT** diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda di sebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti :

- **Straf** diartikan sebagai pidana hukum,
- **Baar** diartikan sebagai dapat dan boleh,
- **Feit** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang pelakunya dapat pidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *Delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum pidana (Amir Ilyas; 2012: 19) memberikan definisi mengenai delik, yakni :

Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

Lanjut Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut :

Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Sementara Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wedrechtelijk*) yang berhubungan

dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Strafbaarfeit diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari karya Buku Lamintang, sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Adapun Lamintang masih dalam buku yang sama merumuskan *Strafbaarfeit* adalah :

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lain sehingga Otomatis pengertiannya berbeda. Agar lebih jelasnya, penulis mengelompokkan dalam 5 kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut :

Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986 : 206) dan lain-lainnya;

Ke-2 : “Perbuatan Pidana” digunakan oleh Moeljanto (1983 : 54) dan lain-lain;

Ke-3 : “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (S.R Sianturi, 1986 : 206) dan lain-lain;

Ke-4 : “Tindak Pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986 : 55), Soesilo (1979 : 26) dan S.R Sianturi (1986 : 204) dan lain-lain.

Sarjana hukum tersebut di atas, menggunakan istilah masing-masing dengan disertai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Moelijatno beralasan bahwa digunakannya istilah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh Moeljanto menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *Starfbaarfeit*.

Lebih jelasnya Moelijatno (Amir Ilyas, 2012: 22) menyatakan sebagai berikut :

1. Kalau *Utrecht*, sudah lazim memakai istilah hukum, maka hukum lalu berarti : *berecht*, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *Starf*, dipidana karena perkara-perkara perdatapun *diberecht*, diadili maka saya memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari “yang dapat dipidana”.
2. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang menunjuk lain pada yang melakukan maupun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk bahwa yang melakukannya adalah “*handling*” atau “*gedraging*” seseorang mungkin atau mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku.

S.R. Sianturi (Amir Ilyas, 2012: 23) menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut :

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti

buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/ klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.

Penggunaan terhadap istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno sebagai berikut :

Meskipun kata tindak lebih pendek daripada kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai kata “perbuatan”.

Andi Zainal Abidin (Amir Ilyas, 2012: 23) mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “*delictum delicta*” karena:

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya);
dan

4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *starfbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia edisi cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”.

Demikian halnya dengan Satochid Kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handling*).

Istilah perbuatan menurut Satochid adalah berarti melakukan, berbuat (*actieve handling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana *staarbaarfeit* yang setelah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah :

“perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) Yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut :

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan ancaman pidana.

Menurut Pompe (Amir Ilyas, 2012: 26) bahwa ada 2 (dua) macam defenisi terkait tindak pidana yaitu :

Defenisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hokum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.

Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *staftbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga di tengah-tengah masyarakat juga dikenal dengan istilah

kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), sebagaimana telah dibahas pada Sub-Bab sebelumnya.

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (***dolus***) dan kealpaan (***culpa***) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (***schuld***) yang dapat menyebabkan

terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Menurut Amir Ilyas, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (2012: 28), Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang
(mencocoki rumusan delik)
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.

B. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut "*abuse*", yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau "*misuse*" yaitu mempergunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya (H. M. Ridha Ma'ruf, 1986:9).

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata Narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

Berikut beberapa definisi mengenai Narkotika :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Smith Kline dan french Clinical staff (Taufik Makarao, dkk; 2003,18) membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut :

“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein,heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).”

Hari Sasangka (2003: 33-34) menjelaskan bahwa defenisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong *dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.

M. Ridha Ma'ruf mengambil kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu :

- 1) Bahwa Narkotika ada dua macam, yaitu Narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk Narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, ganja, *hashish*, *codein*, *cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan Narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian Narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya za-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *Stimulant*.
- 2) Bahwa Narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.
- 3) Bahwa Narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *nercotic and dangerous drugs*.

Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi (Hari Sasangka, 2003: 35).

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah

penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau Narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat Narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan Narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut, hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpak hak atau melawan hukum.

2. Jenis-jenis Narkotika

a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkalida

dalam bentuk cairan, padat dan bubuk (Andi Hamzah dan RM. Surahman,1994:16).

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

- Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman papaver somni verum yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinnya.
- Opium masak adalah:
 - 1) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - 2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

Menurut Smite Kline (Hari Sasangka, 2003:41), gejala putus obat (*uithdrawe*) dari candu adalah:

- a) Gugup, cemas dan gelisah
 - b) Kupil mengecil dan bulu roma berdiri
 - c) Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat
 - d) Badan panas dingin, kaki dan punggung tersa sakit
 - e) Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah
 - f) Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur
 - g) Pernapasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah
 - h) Perasaan putus asa
- b. Morphin

Perkataan “morphin” itu berasal dari bahasa Yunani “*Morpheus*” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.

Morphin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:

- a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakainya dengan cara injeksi;

- b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh;
- c) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

c. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya.

Ganja mempunyai efek psikis antara lain ; timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu :

- 1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
- 3) Berbentuk daun, biji, dan tangkai ntuk rokok

- 4) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung
- 5) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun (Hari sasangka, 2003:50)

d. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester *l*-bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$ (13).

Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:

- a) Cairan berwarna putih atau tanpa warna;
- b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca);
- c) Bubuk berwarna putih seperti tepung;
- d) Tablet berwarna putih.

Kokain adalah obat yang termasuk dalam golongan stimulant saraf pusat yang populer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Obat ini banyak disalahgunakan (drug abuse) sehingga menimbulkan ketagihan (adiksi) bagi penggunaannya. Kokain berasal dari daun *Erythroxylon Coca L.*

Tanaman tersebut kebanyakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di pulau Jawa kadang-kadang ditanam secara sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar (Hari Sasangka, 2003:55).

Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain basa. Bentuk garam (kokain-HCL) mudah larut dalam air dan biasanya digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basa digunakan dengan cara dijadikan rokok. Yang paling sering digunakan adalah cara dihirup dan kokain itu diabsorbsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak.

Dalam bidang ilmu kedokteran kokain dipergunakan sebagai anestesi (pemati rasa) lokal :

- 1) Dalam pembedahan pada mata, hidung, dan tenggorokan
- 2) Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara menyemburkan larutan kokain
- 3) Menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan dijahit, cara yang digunakan adalah menyuntik kokain
- 4) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain ke dalam ruang ekstradural bagian lumbal, anestesi lumbal (Hari Sasangka, 2003:58).

e. Heroin

Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acethalasi dengan aceticanydrida

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat.
- 2) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.
- 3) Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya.
- 4) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

f. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

g. Ekstasi

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul.

Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu :

- Perasaan gembira yang meluap-luap
- Perasaan nyaman
- Rasa mual
- Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)
- Meningkatnya kedekatan dengan orang lain
- Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang
- Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk
- Paranoia, kebingungan
- Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah
- Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba).

Sedikit yang diketahui tentang pengaruh jangka panjang dari pemakaian ekstasi, tetapi kemungkinan kerusakan mental dan psikologis sangat tinggi. Berikut adalah apa saja yang kita sudah tahu:

- Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat
- Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat
- Ada bukti bahwa obat ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati
- Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan.

Jenis ekstasi (tergolong jenis adiktif) yang sudah beredar di Indonesia dari ratusan jenis ekstasi yang sudah ada, di antaranya sebagai berikut: Star: mempunyai logo bintang, Dollar: mempunyai logo uang dolar Amerika, Apple: mempunyai logo apel; Mellon/555: mempunyai logo 555 berwarna hijau, Pink: berwarna merah hujau, Butterfly: mempunyai logo kupu-kupu dan berwarna biru, Pinguin, Lumba-lumba, RN: mempunyai logo RN berwarna hijau laut, Elektrik, Apache, Bon Jovi, Kangguru, Petir, Tanggo, Diamond: berwarna intan warna hijau, Paman Gober: logo mirip paman gober, Taichi: berwarna biru atau kuning, Balck Heart: berbentuk hati berwarna hitam (Hamami Nata, 1997:8-9).

h. Narkotika sintesis dan buatan

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi pada pemakainya :

1) *Depressant*

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan depressant adalah *Sedative/ Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranquilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metanium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

2) *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem saraf simpatik dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah

atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar.

Obat-obat yang tergolong stimulant adalah *Amfetamine* atau *ectacy*, *Menth-Amphetamine* atau *shabu-shabu*, *Kafein*, *Kokain*, *Khat*, *Nikotin*. Obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

3) *Hallucinogens*

Zat yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah, L. S. D. (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D. (*Phencilidine*), D. M. T. (*Demithyltryptamine*), D. O. M. (*illicid forms of STP*), *Psylacibe Mushroom*, *Peyote Cactus*, *Buttons* dan *Ground Buttons*.

4) Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung Alkohol, seperti wine, beer, vodka, whisky dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, kalsium, asam folat,

magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis narkoba diatas kita dapat menggolongkannya menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba digolongkan menjadi :

- a. Narkoba Golongan I : Narkoba yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.
 - Yang termasuk narkoba golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin dan lain-lain.
- b. Narkoba Golongan II :Narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.
 - Yang termasuk narkoba golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabu-shabu, Hashish dan lain-lain.
- c. Narkoba Golongan III : Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

- Yang termasuk narkoba golongan III yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti Beer, Vodka, Wine, Whisky dan lain-lain.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Peraturan mengenai narkoba telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ini berarti bahwa untuk menjerat pelaku kejahatan narkoba, maka yang paling tepat untuk digunakan adalah Undang-Undang ini yang sifatnya lebih khusus dari peraturan-peraturan lainnya.

Berikut ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pasal-Pasal yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, tau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikn Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- 1) Setiap penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103
- 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

C. Unsur Tindak Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan

Menurut satochid Kartanegara (Laden Marpaung, 2005 : 10) bahwa:

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat;
3. Keadaan.

Semuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang berupa :

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesalahan.

Menurut Lamintang (Laden Marpaung, 2005 : 10) bahwa:

Unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHPidana.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan, pencurian dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat Melawan hukum
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam melakukan kejahatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

unsur-unsur perbuatan pidana menjadi 5 (lima) (Moeljatno, 2009: 69), yakni :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Namun demikian, dengan tidak adanya defenisi yang lengkap menurut

Pandangan dualistis tentang tindak pidana, maka unsur- unsur tindak pidana umumnya (Adami Chazawi, 2002: 79) adalah :

1. Perbuatan aktif dan pasif.

Perbuatan aktif atau pasif apabila perbuatan itu dilakukan tanpa disadari walaupun diatur oleh aturan hukum buatan tertulis belumlah merupakan "*strafbaar handlung*" (perbuatan pidana), jika tidak dipandang sebagai suatu perbuatan tercela dan buruk menurut manusia umumnya. Andi Zainal Abidin berpendapat sebagai berikut :

"suatu perbuatan aktif dan pasif barulah dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, dan juga bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat, dengan kata lain bertentangan dalam hukum yang tertulis".

2. Akibat (hanya pada tindak pidana materil)

Akibat pada tindak pidana materil akibat pada tindak pidana materil, yakni adanya akibat tertentu di dalam tindak pidana materil sehingga KUHP sendiri tidak mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pembuatan tindak pidana.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa hanya menentukan dalam bebreapa Pasal, bahwa untuk delik-delik tersebut diperlukan adanya suatu akibat tertentu, guna dapat menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.

3. Melawan hukum formil dan materil

Melawan hukum formil adalah unsur yang bertentangan dengan undang-undangan pidana tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil, yaitu melawan hukum dalam arti luas, dimana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis, tetapi juga norma-norma sosial yang tidak tertulis.

4. Keadaan yang menyusul atau keadaan tambahan

Dikatakan keadaan yang menyusul apabila perbuatan itu merupakan kemufakatan jahat terlaksana tanpa adanya pelaporan pada yang berwajib. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula. Misalnya dalam Pasal 164 dan 165 KUHP. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui terjadinya suatu kejahatan, kalau kejahatan itu betul-betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

Van Hamel menyatakan bahwa syarat tambahan tersebut tidaklah menyangkut "*strafbaar feit*" sebab tidak mungkin suatu keadaan yang timbulnya kemudian dari pada perbuatan member kepadanya keadaan yang demikian tadi, menghilangkan sifat tersebut, yang mungkin ialah perbuatan terlarang "*strafwaring*" yaitu patut dipidana.

5. Tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf

Andi Zainal Abidin menyatakan sebagai berikut :

- a. Alasan pembenar, dimana sifat melawan hukum perbuatan japus dan tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim.
- b. Alasan pemaaf, perbuatan pidana semua unsur terbukti, tetapi pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Moeljatno menyatakan sebagai berikut :

- a. Alasan pembenar yaitu, alasan menghapus sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf yaitu, alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dipidana karena tidak adanya kesalahan.

Pasal 44 kitab Undang-undang Hukum pidana menguraikan bahwa orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam 2 (dua) hal sebagai berikut :

- 1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau;
- 2. Terganggu karena penyakit

Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelum orang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini “pembuat” tidak dapat dipersamakan dengan

“pelaku materil”. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap pelaku materil (*pleger*) tetapi pembuat (*dader*). Oleh karena itu, apakah pertanggungjawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana atau orang lain yang ada kaitannya dengannya (pembuat selain pelaku), merupakan persoalan penetapan suatu tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana. Sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskan sebagai tindak pidana) ‘hubungan tertentu’ seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.

Dipidanya penyuruh melakukan (*doenpleger*) dan penganjur (*uitlokker*) tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, Cuma karena mempunyai ‘hubungan tertentu’ dengan pelaku materilnya. Pidanaan terhadap mereka yang menyuruh melakukan ataupun mereka yang menganjurkan hanya dapat terjadi melalui penetapan undang-undang. Baik penyuruh melakukan maupun penganjur, keduanya tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetapi dipandang melakukan tindak pidana jika karena suruhan dan anjurannya seseorang melakukan tindak pidana. Demikian pula halnya dalam turut serta melakukan dan pembantuan.

Mereka semua dipandang sebagai melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya ditujukan terhadap perbuatan itu.

Dalam hal ini pandangan yang menyatakan penyertaan (*deelneming*) merupakan *tatbestandausdehuhungsgrund*, yaitu dasar memperluas delik (Chairul Huda, 2008: 41). Dengan demikian, semua bentuk penyertaan, termasuk menyuruh melakukan dan penganjuran, merupakan bentuk-bentuk khusus perwujudan tindak pidana dan bukan peruasan pertanggungjawaban pidana. Dapat dipidanya penyuruh melakukan dan penganjur karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana atau penganjuran dan pada orangnya harus diliputi kesalahan. Bukankah menyuruh melakukan dan penganjuran itu harus pula dilakukan dengan sengaja. Artinya, selain terbukti menyuruh melakukan atau menganjurkan (perbuatan), masih diperlukan kesengajaan (kesalahan) untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka. Penyertaan bukanlah *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Para peserta delik melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang lebih diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan konsepsi di atas ancaman pidana dalam rumusan suatu tindak pidana diorientasikan baik pada pembuatnya maupun pada orang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut. Jika pembuat bukanlah pelaku materil, maka perlu penetapan undang-undang (kriminalisasi) jika orang-orang lain yang 'terlibat' juga ingin diancam pidana (Leden Marpaung, 2005 : 77-89).

D. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Rumusan Perundang-Undangan

Rumusan ini terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55

1). Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum :

Ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

2). Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum :

Ke-1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2 : mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua Pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2009: 117), yaitu:

- a. yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
- b. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*),
- c. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*),

- d. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*),
- e. yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

A. Menyuruh Melakukan Perbuatan (*doen plegen*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 adalah : menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku macam ini. Dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

Dengan sendirinya kita ingat pada apa yang telah dibicarakan di atas mengenai sebagian dari alasan menghilangkan sifat tindak pidana, yaitu dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) secara relatif dari Pasal 48 KUHP, dalam hal melaksanakan perintah jabatan yang sah dari Pasal 51 ayat 1 KUHP, dan dalam hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi secara jujur dari Pasal 51 ayat 2 KUHP. Dalam ketiga hal inilah pertama-tama terwujud penyertaan berupa “menyuruh melakukan” atau *doen plegen* (Wirjono Prodjodikoro, 2009: 119),

B. Turut Melakukan Perbuatan (*medeplegen*)

Dalam KUHP tidak ada penegasan apa yang dimaksudkan dengan kata *medeplegen* ini, maka ada perbedaan pendapat tentang arti dari istilah ini.

Ternyata, kini seperti dalam hal percobaan atau *poging*, terdapat dua golongan pendapat, yang satu bersifat subjektif dengan menitikberatkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku (*mededader*), sedangkan para objektivis lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku; wujud tersebut harus cocok dengan perumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Menurut Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Wirjono Prodjodikoro, 2009: 123-124).

C. Membantu melakukan Tindak Pidana (*medeplichtige*)

Di atas sudah dibahas hal menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*mede plegen*) keduanya disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP. Kemudian oleh Pasal 55 ayat 1 nomor 2 disebutkan hal membujuk melakukan (*uitlokken*) dan baru pada Pasal 56 dicantumkan hal membantu melakukan (*medeplichtige*).

Berbeda dengan urutan dalam KUHP ini, hal membantu melakukan akan dibahas lebih dulu dari hal membujuk melakukan oleh karena dalam wujudnya ada persamaan erat antara turut melakukan dan membantu melakukan.

Jika istilah turut melakukan oleh KUHP tidak dijelaskan artinya, sebaliknya istilah membantu melakukan dijelaskan secara tegas dalam Pasal 56 KUHP. Di sana diadakan dua golongan membantu melakukan yaitu kesatu : perbuatan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan, dan kedua : perbuatan bantuan sebelum pelaku utama bertindak, dan bantuan itu dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Dalam golongan bantuan pertama tampak bahwa persamaan dengan turut melakukan, maka bagi golongan inilah ada persoalan, di manakah batasnya antara turut melakukan dan membantu melakukan. Mengenai golongan bantuan kedua, ada persamaan dengan membujuk melakukan (*uitlokking*) (Wirjono Prodjodikoro, 2009: 126).

D. Membujuk Melakukan Tindak Pidana (*uitlokking*)

Di atas sudah dikatakan bahwa tidak semua pembujukan untuk melakukan tindak pidana dikenai hukuman, tetapi hanya pembujukan dengan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 nomor 2. Mula-mula, yang disebutkan hanya pemberian kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, paksaan, ancaman, atau

penipuan. Kemudian cara-cara ini ditambah dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

Jadi, yang ditambahkan ini adalah cara-cara disebutkan dalam hal pembantuan. Dengan demikian, seorang peserta (*delnemer*) tindak pidana yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, dapat merupakan seorang pembujuk atau seorang pembantu, apabila inisiatif itu datang dari si pelaku utama. Persamaan antara kedua cara penyertaan tindak pidana ini adalah bahwa menurut Pasal 55 ayat 2 perihal pembujuk dan menurut Pasal 57 ayat 4 perihal pembantu, hal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada keduanya adalah perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja dibujuk atau dibantu. Perlu dicatat bahwa menurut kata-kata Pasal 55 ayat 1 nomor 2, yang dengan sengaja dibujuk itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Dan, ini dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk menganggap adanya pembujukan yang dapat dikenai hukuman adalah bahwa perbuatan dari tindak pidana harus sudah selesai dilakukan, atau setidaknya harus sudah tercapai suatu percobaan yang dapat dikenai hukuman menurut Pasal 53 KUHP (Wirjono Prodjodikoro, 2009: 130).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Tana Toraja.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti seperti, di Pengadilan Negeri Makale.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

C. Jenis Penelitian

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu merupakan sesuatu yang nyata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pada Perkara No.165/Pid.Sus/2012/PN.MKL

Sebagaimana diketahui bersama secara garis besar hukum pidana Indonesia tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dikenal ada 2 (dua) macam tindak pidana yang dianut oleh KUHP, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Contoh perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, misalnya seseorang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, sedangkan contoh dari kejahatan, misalnya membunuh, mencuri, dan sebagainya.

Untuk proses penanganan dan pemeriksaan kasus tindak pidana di Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan, lalu dilakukan proses penyusunan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terakhir adalah proses memeriksa dan mengadili yang dilakukan oleh majelis Hakim.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dipersoalkan pada berat ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat dari sanksi pidana itu sendiri dan seberapa besar

pengaruh sanksi pidana yang dikenakan itu dapat merubah perilaku jahat atau membuat si terpidana menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya. Sejak tahun 1976, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Namun seiring perkembangan zaman dimana tindak pidana Narkotika makin marak, maka pemerintah Indonesia kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hukum pidana Indonesia juga mengenal pemberlakuan dua pidana/hukuman pokok secara bersamaan terhadap satu atau beberapa pelaku tindak pidana, yang walaupun dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas dilarang penerapan pidana pokok secara bersamaan terhadap pelaku tindak pidana. Tetapi tentunya dalam hal ini, penerapan pidana pokok secara bersamaan yang penulis maksudkan adalah terhadap tindak pidana khusus atau tindak pidana narkotika yang memang mengenal penerapan pidana kumulatif. Oleh karena itu, bila kita hubungkan dengan ketentuan KUHP yang melarang penerapan pidana pokok secara kumulatif, tentunya hal ini pada dasarnya tidak berlaku pada tindak pidana narkotika karena tindak pidana narkotika merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP.

Hal tersebut di atas berhubungan dengan asas hukum yang dikenal dalam perkembangan ilmu hukum yang menyatakan *lex specialis derogate legi generalis* atau ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, artinya manakala ada persoalan hukum yang termasuk

dalam ketentuan khusus, maka ketentuan yang umum tidak berlaku kalau ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan khusus. Kemudian mengenai penerapan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkoba, secara yuridis formil memang hal tersebut diakui dalam undang-undang narkoba seperti penulis uraikan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Kemudian khusus penerapan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, menurut Donald Everly Malubaya (wawancara Tanggal 25 september 2013), Hakim Pengadilan Negeri Makale, bahwa hampir semua pelaku tindak pidana narkoba yang diadili di pengadilan dikenakan pidana secara kumulatif. Penerapan pidana ganda dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkoba. Dalam Pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwa :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Berdasarkan Pasal tersebut, maka pelaku tindak pidana narkoba

diancam dengan penjatuhan pidana pokok secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Lebih lanjut Donald Everly Malubaya (wawancara tanggal 25 september 2013), Hakim Pengadilan Negeri Makale, mengemukakan bahwa penerapan pidana pokok secara kumulatif dimaksudkan sebagai efek jera bagi para produsen, penyuplai, dan pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan narkoba tersebut. Tetapi ternyata dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana narkoba dan masyarakat secara umum tidak merasa jera dengan beratnya ancaman sanksinya karena ternyata banyak putusan hakim yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan atau keuntungan yang diperoleh dari peredaran narkoba.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkoba memegang peranan penting karena narkoba ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari pemakaian yang berlebihan serta berulang-ulang ini dan tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara langsung ataupun tidak langsung

dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkoba tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Bahaya dari narkoba ini telah menjadi perhatian banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan korban penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda dan oleh karena itu penanggulangan narkoba mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah, mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah luas dan secara perlahan akan mengantarkan bangsa ini kepada gerbang kehancuran. Keseriusan pemerintah dalam hal ini dapat kita lihat secara jelas dimana para pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dijerat dengan menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini dianggap perlu sebagai tindak lanjut dari penanggulangan bahaya narkoba yang secara umum dapat mengancam ketertiban umum dan mengganggu keamanan yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan nasional.

Pada perkara nomor 165/pid.sus/2012/PN.Makale, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum ditambah dengan pembuktian di Pengadilan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka

majelis hakim Pengadilan Negeri Makale berkesimpulan bahwa penerapan hukum pidana materil telah terpenuhi, yaitu mengenai jenis tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Disebutkan bahwa :

”setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjdai perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perlu untuk diketahui bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena di dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsure mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Dengan disebutkannya kata “atau” di dalam frase tanpa hak atau melawan hukum, tentu bisa jadi tindak pidana dilakukan sekaligus tanpa hak dan melawan hukum, atau apabila salah satu terbukti, yaitu tanpa hak saja atau melawan hukum saja, unsure ini pun telah terpenuhi. Namun demikian, perbedaan prinsipil antara tanpa hak dengan melawan hukum adalah bahwa tanpa hak melekat pada diri seseorang, sementara melawan hukum keberadaannyadi luar diri seseorang. Dengan mengingat bahwa yang berhak melakukan perlakuan terhadap Narkotika golongan I dalam rangka peredaran adalah hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga

ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti bisa dipastikan bahwa tidak ada individu dalam pengertian bebas yang bisa melakukan peredaran Narkotika golongan I, dan ternyata para terdakwa bukanlah pedagang farmasi atau lembaga yang diatur dalam UU NO. 35 tahun 2009 yang punya hak untuk mengedarkan Narkotika golongan I. dengan demikian, perbuatan para terdakwa sudah bertentangan dengan ketentuan tertulis Yang telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam koridor melawan hukum secara formil.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dalam Perkara nomor 165/pid.sus/2012/PN.Makale.

Pada perkara narkotika golongan I dengan nomor perkara 165/pid.sus/2012/PN.Makale, majelis hakim Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana termaktub dalam putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yudistira Abeng Manika Bakry alias yudi, dan Terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus / paket Narkotika jenis ganja dengan berat 6,9 (enam koma Sembilan ratus miligram) dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Casablanca dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson warna hitam ada stiker daun ganja dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ada stiker daun ganja dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa Yudistira Abeng Manika, dkk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun posisi kasus perkara tersebut sebagaimana termaktub dalam putusan adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Yudistira Abeng Manika Bakri alias Yudi dan Terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir pada hari Rabu tanggal 19 september 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di lumbung kantor BPS Gereja Toraja di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makale, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias Yudi dan Terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir sedang menunggu Magonna (DPO) untuk menyerahkan ganja yang telah dipesan Magonna sebelumnya seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias Yudi telah menerima Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Magonna;
- Adapun ganja tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias Yudi dari Bebs (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan ganja tersebut adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya Magonna datang dengan menumpang sebuah bentor dan turun dari bentor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa . Yudistira Abeng Manika alias Yudi dan Terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir;
- Setelah itu petugas kepolisian Polres Tana Toraja yaitu saksi Ahmad Yasin, saksi Sapan Masiku dan saksi Indra Batara langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada diri Terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias Yudi dan terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir dan dari hasil penggeledahan, ditemukan plastic warna putih berisi 7 (tujuh) paket/ bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam kantong jaket yang dipakai oleh terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir, yang mana narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias Yudi dan Terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir sebagai miliknya;
- Kemudian saksi Ahmad Yasin, saksi Sapan Masiku dan Saksi Indra Batara juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias Yudi dan terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus yang terbungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan di dalam bungkus rokok warna putih merek Marlboro yang tersimpan dalam tas warna hitam bertuliskan Casablanca yang terletak di atas lemari terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir sehingga narkoba jenis ganja ditemukan seluruhnya berjumlah 8 (delapan) paket/ bungkus dengan berat seluruhnya 6,9 gram padahal terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias Yudi dan terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir bukan yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia untuk menjual atau menyerahkan narkoba jenis ganja kepada pihak lain;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1114/NNF/IX/2012 tanggal 21 september yang dalam kesimpulan menyatakan :
 1. Barang bukti biji daun kering milik terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias Yudi dan terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 2. Barang bukti urin dan darah milik Terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias Yudi dan Terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir tersebut adalah tidak ditemukan bahan narkoba;

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Saksi merupakan salah satu pihak yang sangat penting dimana KUHAP menempatkan saksi di urutan pertama di atas alat-alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Adapun keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana termaktub dalam putusan adalah sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD YASIN (POLISI)
(*bersumpah*) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan/ makan gaji dengan para terdakwa;
 - Bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi di polisi sudah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui, para terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari rabu tanggal 19 september 2012 sekitar jam 14:00 wita, bertempat di jalan Ahmad Yani kelurahan Rantepao Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di halaman/ lumbung kantor BPS Gereja Toraja kab. Toraja Utara);
 - Bahwa, awal penagkapannya, setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saksi dan rekan saksi diperintahkan oleh kasat narkoba yang langsung memerintahkan anggota bagian narkoba sebanyak 7 (tujuh) orang untuk menuju ke Rantepao dengan dipimpin kasat narkoba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dan saksi juga ikut melakukan penangkapan;
 - Bahwa, saksi dan rekan saksi sudah mengetahui ciri-ciri para terdakwa dari pelapor;
 - Bahwa, para terdakwa yang ditangkap merupakan target penangkapan setelah saksi dan rekan saksi menerima info dari masyarakat pada saat itu juga;
 - Bahwa, sesampainya di lokasi dimana para terdakwa berada, saksi dan rekan saksi langsung menggerebek para terdakwa;

- Bahwa, posisi para terdakwa sementara duduk-duduk di lumbung;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menemukan ganja di kantong jaket terdakwa yang bernama Akir (terdakwa II) dan saat menemukannya, kemudian saksi mengambil dari jaket terdakwa II lalu saksi memegang terdakwa untuk membuka tangannya dan setelah tangannya dibuka, ternyata didapat lagi ganja;
- Bahwa, jumlah paket narkoba yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) paket bungkus kecil, dan setelah digeledah rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) pakatnya ditemukan di dalam ransel dan disimpan dalam bungkus rokok;
- Bahwa, barang bukti berupa narkoba tidak ditemukan pada terdakwa I, tetapi barang bukti yang ditemukan pada terdakwa II adalah milik terdakwa I dan Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa, saksi bertugas pada bagian narkoba selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa, barang bukti berupa ganja sudah diteliti di laboratorium oleh ahli forensic di Makassar;
- Bahwa, hasil laboratoriumnya mengandung ganja;
- Bahwa, menurut para terdakwa, ganja tersebut untuk dijual dengan harga 1 (satu) paket yakni Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada para terdakwa dan menurut para terdakwa, barang tersebut diperoleh dari temannya di Makassar bernama Petrus;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga yang dibeli oleh para terdakwa dari temannya;
- Bahwa, barang bukti lain yang saksi temukan berupa handphone para terdakwa;
- Bahwa; tidak ada pesan yang saksi temukan di dalam handphone para terdakwa;
- Bahwa, pada waktu saksi dan rekan saksi tiba di lokasi penangkapan, para terdakwa sementara duduk-duduk di lumbung untuk menunggu pembeli;
- Bahwa, saksi menanyakan siapa pembeli barang narkoba setelah tiba di kantor;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual ganja;
- Bahwa, 7 (tujuh) paket ganja tersebut baru direncanakan untuk dijual tetap belum sempat dijual;
- Bahwa, pembeli ganja belum ada di lokasi saat itu;
- Bahwa, hasil urin para terdakwa yaitu:
 Urin = negatif
 Darah = negative

- Bahwa, sebabnya tidak dibuka keseluruhan narkoba jenis ganja yang ada pada para terdakwa karena tidak ada aturan yang mewajibkan untuk membuka semua narkoba jenis ganja yang ada para terdakwa tersebut, yang penting kami sudah melihatnya itu sudah cukup menjadi bukti;
- Bahwa, yang saksi tanyakan bahwa akan dijual kepada siapa ganja tersebut, lalu para terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut akan dijual kepada kony;
- Bahwa, saksi tidak melihat para terdakwa melakukan transaksi;
- Bahwa, saksi dan teman saksi lainnya tidak melihat para terdakwa saat menerima barang bukti;
- Bahwa, 7 (tujuh) orang yang ikut menggeledah rumah terdakwa;
- Bahwa, saksi langsung melihat saat barang bukti ditemukan karena saksi berada tepat disamping para terdakwa;
- Bahwa, 7 (tujuh) orang yang mendengar hasil interogasi terhadap terdakwa II yang mengatakan bahwa barang bukti narkoba adalah milik terdakwa I dan terdakwa I mengakuinya;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, apara terdakwa berkeberatan dengan berpendapat bahwa terdakwa I tidak pernah mengakui jika barang itu milik terdakwa I karena barang bukti narkoba itu memang bukan milik terdakwa I dan barang bukti narkoba tersebut tidak untuk dijual karena barang bukti narkoba akan diberikan kepada Magonna. Magonna adalah pemilik dari narkoba tersebut. Keterangan terdakwa I yang ada di BAPenyidikan bahwa barang terbukti narkoba tersebut untuk dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu tidak benar jika terdakwa I pernah mengakuinya. Terhadap keberatan dari pera terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi SAPAN MASIKU, SH. (POLISI)

(berjanji) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan/ makan gaji dengan para terdakwa;
- Bahwa, saksi ketahui, para terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa, kejadiannya pada hari rabu tanggal 19 september 2012 sekira pukul 14:00 wita bertempat di jalan Ahmad Yani kelurahan Rantepao Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di halaman/ lumbung kantor BPS Gereja Toraja Kab. Toraja Utara);
- Bahwa, awal penangkapannya, setelah saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi dan rekan saksi diperintahkan oleh kasat narkoba yang langsung

memerintahkan anggota bagian narkoba sebanyak 7 (tujuh) orang untuk menuju ke Rantepao dengan pimpinan oleh kasat narkoba dengan mengenai (1) satu unit mobil dan saksi juga ikut melakukan penangkapan;

- Bahwa, sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi di tempat itu;
- Bahwa, saksi pernah menyamar sebagai pembeli secara terselubung di tempat itu;
- Bahwa, awalnya saksi membeli dari seseorang dan seseorang tersebut membelinya kepada terdakwa I (yudi), lalu saksi memantau dari jarak 10 (sepuluh) km;
- Bahwa, selang waktu antara saksi menjadi penyamar dengan sebelum para terdakwa di tangkap adalah berselang 1 (satu) minggu saat saksi membeli narkoba sebelum para terdakwa ditangkap di sekitar lokasi itu;
- Bahwa, saksi yakin bahwa narkoba tersebut dibeli dari terdakwa I (yudistira);
- Bahwa, saat itu saksi membeli narkoba dari terdakwa I dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu saksi membeli 2 (dua) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) kali saksi menyamar sebagai pembeli terselubung;
- Bahwa, saksi sudah tahu bahwa terdakwa I akan ditangkap pada tanggal 19 saksi mengetahui jika terdakwa I (Yudistira) akan ditangkap karena sudah dapat info sebelumnya;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan, barang bukti dipegang oleh terdakwa II kemudian barang bukti tersebut diambil oleh anggota lain yang iktu dalam penangkapan waktu itu;
- Bahwa, tidak ada barang butki yang ditemukan pada diri Terdakwa I;
- Bahwa, setelah para terdakwa ditangkap, saksi dan rekan saksi langsung membawanya ke kantor untuk diinterogasi mengenai barang bukti, bahwa terdakwa I mengetahui jika narkoba tersebut adalah miliknya dan terdakwa II mengatakan : “tidak apa-apa narkoba itu dititip pada Yudistira (terdakwa I)” dan menurut para terdakwa, narkoba itu akan diserahkan kepada magonna karena mau dijual;
- Bahwa, terdakwa I menjadi target penangkapan karena 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi jika terdakwa I terkait atas kepemilikan narkoba;
- Bahwa, 1 (satu) paket ditemukan di rumah terdakwa II dan 7 (paket) di dapat di jaket terdakwa II;

- Bahwa, saksi menanyakan kepada para terdakwa darimana narkoba itu dan menurut para terdakwa, bahwa narkoba tersebut dibeli dari bebs yang berada di Makassar;
- Bahwa, hasil urin para terdakwa yaitu:
 Urin = negatif
 Darah = negatif
- Bahwa, menurut para terdakwa, narkoba dikirim melalui perwakilan bus litha & co. setelah barang narkoba tiba di toraja, terdakwa I yang mengambilnya;
- Bahwa, menurut para terdakwa, bahwa uang transaksi pembelian narkoba ditransfer ke rekening temannya di Makassar;
- Bahwa, uang yang ditransfer adalah milik terdakwa I;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu kronologisnya karena saksi tidak ikut di rumah terdakwa II, saksi baru tahu setelah terdakwa II diinterogasi di kantor;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa karena sudah mendapatkan informasi sebelumnya tentang terdakwa I;
- Bahwa, saksi tidak membeli narkoba secara langsung kepada terdakwa I, tapi saksi memantau dari jarak jauh;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) paket;
- Bahwa, tidak ada tekanan dari petugas kepolisian saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I keberatan karena seminggu sebelum penangkapan, Terdakwa I tidak pernah menjual ganja karena terdakwa I berada di kampung. Sementara terdakwa II berkeberatan pula terhadap keterangan saksi tersebut dengan berpendapat bahwa barang bukti narkoba tidak ditemukan di jaket terdakwa II tapi ditemukan di kantong terdakwa II. Terhadap keberatan dari para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. INDRA BATARA R, SE. (POLISI)

(berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dengan para terdakwa, serta tidak berhubungan pekerjaan/ makan gaji dengan para terdakwa;
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang masalah dalam perkara ini sehingga para terdakwa diperiksa di persidangan adalah karena para terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 19 september 2012 sekira pukul 14:00 wita bertempat di jalan Ahmad Yani kelurahan Rantepao kab. Toraja Utara (tepatnya di halaman/ lumbung kantor BPS Gereja Toraja kab. Torajka Utara);
- Bahwa, para terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis ganja dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saksi dan rekan saksi diperintahkan oleh kasat narkoba yang langsung memerintahkan anggota bagian narkoba sebanyak 7 (tujuh) orang menuju Rantepao dengan dipimpin kasat narkoba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil. Cirri-ciri dan lokasi tempat keberadaan para terdakwa sudah diberitahukan oleh kasat narkoba dan sesampainya di tempat kejadian, saksi dan Sapan Masiku, SH. Turun dari mobil lalu pergi ke lumbung untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa, saat itu, barang bukti narkotika ditemukan di tangan terdakwa II (Muliakir) dimana saat itu, saksi sempat memukul tangan terdakwa II supaya tmau membuka tangannya;
- Bahwa, pada saat barang bukti sudah diambil para terdakwa, kemudian barang bukti tersebut sempat dibuka, kemudian dipastikan bahwa narkotika itu berjenis ganja dan telah diteliti di laboratorium yang hasilnya adalah positif jenis ganja;
- Bahwa, hasil pemeriksaan urin para terdakwa adalah :
 Urin = negatif
 Darah = negatif
- Bahwa, saksi menanyakan kepada para terdakwa darimana narkotika itu dan menurut para terdakwa bahwa narkotika tersebut dibeli dari Bebs yang berada di Makassar;
- Bahwa, selain di tempat penangkapan, 1 (satu) paket ditemukan setelah Terdakwa II diinterogasi, ditemukan lagi di rumah terdakwa II yaitu didapat di dalam tas di lantai 2 (dua);
- Bahwa, saksi tidak melihat saat tas itu diambil di atas rumah terdakwa II;
- Bahwa, menurut para terdakwa bahwa narkotika itu akan diserahkan kepada magonna karena untuk dijual;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan ganja;
- Bahwa, terdakwa I (Yudistira) diinterogasi selam kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian terdakwa I digeledah tetapi tidak ditemukan barang bukti. Lalu terdakwa II (muliakir) digeledah dan ditemukan barang bukti. Setelah itu saksi dan rekan saksi ke rumah terdakwa II untuk digeledah dan ditemukan juga barang bukti;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada transaksi;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah para terdakwa dipukul saat itu; *Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan dengan berpendapat bahwa para terdakwa dipukul oleh pak pasumbang dan pak Iskandar. Terhadap keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;*

Menurut Donald Everly Malubaya (wawancara Tanggal 25 september 2013), hakim Pengadilan Negeri Makale, bahwa dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dilihat dari dakwaan penuntut umum yang mencakup perbuatan atau kesalahan dari terdakwa. Hal itulah yang menjadi dasar di pengadilan dan di persidangan oleh hakim. Selain itu, hakim berdasar pula pada alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hukum itulah, hakim menjatuhkan putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan apa yang telah di buktikan di persidangan dari alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa 7 (tujuh) paket ganja. Kemudian dari alat bukti dan barang bukti tersebut, semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dibuktikan di persidangan.

Adapun unsur-unsur pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini “barang siapa” yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjukkan kepada terdakwa I Yudistira Abeng Manika alias Yudi dan terdakwa II Muliakir Umar Madao alias Akir yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya. Selain itu, di dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya. Selain itu, di dalam persidangan paravterdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian di persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah dewasa berakal sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap/ mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dialkukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan para terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan yang diikutinya selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk mengikuti persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Tentang unsur “tanpa hak” ini berarti pada diri terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, walaupun ada haruslah dengan izin yang sah dari yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” berarti ada ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ahmad Yasin, Sapan Masiku, SH. dan Indra Batara, SE. dan keterangan atau pengakuan oleh para terdakwa sendiri bahwa :

- a. Para terdakwa telah tertangkap tangan mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I sebanyak 7 (tujuh) paket yang tersimpan di saku jaket dan di rumah terdakwa.
- b. 7 (tujuh) paket ganja tersebut dikuasai oleh para terdakwa tanpa surat izin yang sah dari yang berwenang, yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi para terdakwa ditangkap beserta barang buktinya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur terbukti, maka terbuktilah unsur ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi Ahmad Yasin, Sapan Masiku, SH. dan Indra Batara, SE. dan keterangan atau pengakuan oleh para terdakwa sendiri, menerangkan bahwa benar pada hari , kejadiannya pada hari rabu tanggal 19 september 2012 sekitar jam 14:00 wita, bertempat di jalan Ahmad Yani kelurahan Rantepao Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di halaman/ lumbung kantor BPS Gereja Toraja kab. Toraja Utara), Bahwa, awal penangkapannya, setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saksi dan rekan saksi diperintahkan oleh kasat narkoba yang langsung memerintahkan anggota bagian narkoba sebanyak 7 (tujuh) orang untuk menuju ke Rantepao dengan dipimpin kasat narkoba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dan saksi juga ikut melakukan penangkapan. saksi dan rekan saksi sudah mengetahui ciri-ciri para terdakwa dari pelapor. Para terdakwa yang ditangkap merupakan target penangkapan setelah saksi dan rekan saksi menerima info dari masyarakat pada saat itu juga. Sesampainya di lokasi dimana para terdakwa berada, saksi dan rekan saksi

langsung menggerebek para terdakwa. Posisi para terdakwa sementara duduk-duduk di lumbung. Saksi dan rekan saksi menemukan ganja di kantong jaket terdakwa yang bernama Akir (terdakwa II) dan saat menemukannya, kemudian saksi mengambil dari jaket terdakwa II lalu saksi memegang terdakwa untuk membuka tangannya dan setelah tangannya dibuka, ternyata didapat lagi ganja. Jumlah paket narkoba yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) paket bungkus kecil, dan setelah digeledah rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) paketnya ditemukan di dalam ransel dan disimpan dalam bungkus rokok. Barang bukti berupa narkoba tidak ditemukan pada terdakwa I, tetapi barang bukti yang ditemukan pada terdakwa II adalah milik terdakwa I dan Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut miliknya.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan di laboratorium oleh ahli forensic di Makassar, Bahwa barang bukti 7 paket ganja milik para terdakwa adalah berasal dari tanaman ganja asli termasuk dalam daftar narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan demikian berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan/ pengakuan terdakwa serta barang bukti yang ada dan satu sama lain berkaitan, maka majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa I. Yudistira Abeng Manika alias

Yudi dan terdakwa II. Muliakir Umar Madao alias Akir telah terbukti bersalah tanpa hak melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dan sepatutnyalah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pada perkara ini, para terdakwa dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim menurut penulis masih tergolong ringan. Apabila putusan majelis hakim bertujuan membuat si terpidana menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya atau memberika *shock teraphy* kepada para pelaku kejahatan narkotika, maka majelis hakim seharusnya menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada si terdakwa. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memang menerapkan pidana maksimal untuk setiap kejahatan narkotika, tetapi majelis hakim yang menjatuhkan sanksi harus lebih jeli dalam menjatuhkan sanksi agar sanksi yang dijatuhkannya itu lebih efektif dan memberikan manfaat bagi si terdakwa.

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara emoiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang

terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sesangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.

Dalam perkara narkoba memang telah diterapkan pidana kumulasi atau penjatuhan pidana pokok secara bersamaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yakni pidana penjara dan pidana denda, tetapi bagi para terpidana mereka lebih memilih pidana pengganti denda, yaitu pidana kurungan oleh karena pidana denda yang begitu besar dan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut begitu ringan. Hal ini sebagaimana dikatakan Donald Everly Malubaya (wawancara tanggal 25 september 2013) Hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa memang banyak pelaku penyalahgunaan narkoba yang divonis dengan pidana penjara dan denda tapi pelaksanaannya terpidana tidak membayar denda dan hanya memilih pidana pengganti dari pidana denda tersebut dengan pidana kurungan, dan hal tersebut memang tidak bisa dipaksakan kepada terpidana untuk membayar denda, karena Undang-Undang memang memberikan pilihan kepada terpidana untuk memilih apakah terpidana membayar denda atau menjalani

hukuman pengganti dari denda yang disebutkan dengan pidana kurungan.

Penerapan pidana kumulatif terhadap tindak pidana narkoba sebenarnya memiliki 2 implikasi sosiologis yang pertama, apakah penerapan pidana ganda mempengaruhi tingkat kejahatan narkoba, dan yang kedua apakah penerapan pidana kumulatif tidak mempengaruhi tingkat kejahatan pelaku narkoba.

Dari kedua tolak ukur di atas, dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makale, maka dapat dikatakan bahwa penerapan pidana kumulatif di Pengadilan Negeri Makale ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba. Hal ini terlihat dengan makin meningkatnya perkara narkoba yang diadili di Pengadilan Negeri Makale. Pada tahun 2011, perkara narkoba yang diadili di Pengadilan Negeri Makale mencapai 8 (delapan) kasus. Pada tahun 2012, perkara narkoba mengalami penurunan, yakni 5 (lima) kasus. Pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 10 (sepuluh) kasus.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Donald Everly Malubaya (wawancara tanggal 25 september 2013), Hakim Pengadilan Negeri Makale, yang menyatakan bahwa penerapan pidana kumulasi sebenarnya tidak mempengaruhi tingkat kejahatan

penyalahgunaan narkoba karena hal tersebut sangat tergantung pada pribadi masing-masing orang, apakah masyarakat atau pelaku narkoba dengan penerapan pidana kumulatif tersebut membuat mereka jera atau takut untuk menyalahgunakan narkoba.

Menurut Donald Everly Malubaya (wawancara tanggal 25 september 2013), Hakim Pengadilan Negeri Makale bahwa bebrapa factor yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan pada perkara narkoba, yaitu :

1. Faktor yang memberatkan

- a. Jenis narkoba

Setiap jenis narkoba memiliki sanksi pidana yang berbeda. Pembuktian penentuan jenis narkoba menjadi dasar dalam pemberian sanksi yang tepat sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang penyalahgunaan Narkoba.

- b. Jumlah narkoba

Jumlah narkoba menjadi dasar sebagai dasar penentuan besarnya sanksi pidana. Semakin besar jumlah narkoba maka semakin besar juga sanksi pidana yang diberikan.

c. Penguasaan atas narkoba

Besarnya sanksi pidana berbeda antara pemakai dan pengedar. Sanksi diperberat apabila sipelaku adalah pengedar narkoba.

d. Dalam hal *recidive*

Pelaku kejahatan narkoba yang mengulangi perbuatannya melakukan kejahatan narkoba kembali, dapat menjadi dasar memperberat sanksi pidana.

e. Memberikan keterangan berbelit-belit

2. Factor yang meringankan, yaitu :

a. Usia

Umur dari terdakwa menjadi alasan bagi JPU untuk memperingan tuntutan pidana. Apabila usia dari pelaku masih muda maka peluang untuk memperbaiki perilaku masih terbuka lebar.

b. Dalam hal penguasaan atas narkoba

Yang meringankan apabila si pelaku merupakan si pemakai. Pemakai dan pengedar memiliki sanksi pidana yang berbeda, dimana sanksi bagi pemakai lebih ringan daripada pengedar.

Menurut Donal Everly Malubaya, Hakim Pengadilan Negeri Makale, bahwa factor-faktor yang mempengaruhi

penjatuhan sanksi dalam perkara nomor 165/pid.sus/2012/PN.Makale adalah :

1. Faktor yang memberatkan

Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran gelap narkoba dimana peredaran gelap narkoba yang sekarang ini sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan, sangat membahayakan sendi kehidupan bernegara khususnya bagi generasi muda yang diharapkan bisa menjadi pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa dan Negara.

2. Faktor yang meringankan:

- a. Para terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- b. Para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;
- c. Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut Donald Everly Malubaya (wawancara tanggal 25 september 2013), Hakim Pengadilan Negeri Makale mengemukakan bahwa peredaran narkoba di Indonesia tidak pernah mengalami penurunan, bahkan kian hari kian meningkat. Peningkatan peredaran

narkotika di Indonesia juga disebabkan oleh tidak efektifnya penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kompleksitas masalah narkotika ini menurut penulis disebabkan oleh beberapa hal, yakni :

Dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pengedar narkoba tidak pernah dituntut dengan hukuman maksimal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal-Pasal yang mengatur tentang pidana kumulatif dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga efek jera dari pemidanaan yang diharapkan tidak dapat menurunkan tingkat kejahatan narkoba dalam setiap tahunnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang penulis uraikan pada BAB IV di atas, maka kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pada perkara nomor 165/pid.sus/2012/PN.Makale, majelis hakim Pengadilan Negeri Makale berkesimpulan bahwa penerapan hukum pidana materil telah terpenuhi, yaitu mengenai jenis tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perlu untuk diketahui bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena di dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsure mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Dengan disebutkannya kata “atau” di dalam frase tanpa hak atau melawan hukum, tentu bisa jadi tindak pidana dilakukan sekaligus tanpa hak dan melawan hukum, atau apabila salah satu terbukti, yaitu tanpa hak saja atau melawan hukum saja, unsure ini pun telah terpenuhi. Namun demikian, perbedaan prinsipil antara tanpa hak dengan melawan hukum adalah bahwa tanpa hak melekat pada diri seseorang, sementara melawan hukum keberadaannyadi luar diri

seseorang. Dengan mengingat bahwa yang berhak melakukan perlakuan terhadap Narkotika golongan I dalam rangka peredaran adalah hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti bisa dipastikan bahwa tidak ada individu dalam pengertian bebas yang bisa melakukan peredaran Narkotika golongan I, dan ternyata para terdakwa bukanlah pedagang farmasi atau lembaga yang diatur dalam UU NO. 35 tahun 2009 yang punya hak untuk mengedarkan Narkotika golongan I. dengan demikian, perbuatan para terdakwa sudah bertentangan dengan ketentuan tertulis Yang telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam koridor melawan hukum secara formil.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 165/pid.sus/2012/PN.makale adalah dilihat dari dakwaan Penuntut Umum yang mencakup perbuatan atau kesalahan dari terdakwa. Hal itulah yang menjadi dasar di pengadilan dan di persidangan oleh hakim. Selain itu, hakim berdasar pula pada alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hukum itulah hakim menjatuhkan putusan.

B. Saran

Dari penjelasan yang penulis uraikan di atas, maka penulis memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Memang penerapan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba telah diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makale, tetapi penerapan pidana denda tersebut tidaklah sebanding dengan jumlah denda yang dikenakan, sehingga banyak terpidana tidak membayar denda dan hanya menjalani pidana pengganti yang diberikan yaitu pidana kurungan yang hanya 1 atau 2 bulan kurungan, sehingga menurut penulis seharusnya ke depan hakim lebih memperhatikan pidana pengganti dari pidana denda tersebut.
2. Penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba seharusnya tidak hanya empat atau lima tahun, tetapi diberikan pidana penjara maksimal sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sehingga hal tersebut bisa membuat pelaku atau orang lain merasa jera atau takut melakukan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta
- Andi Hamzah dan RM. Surahman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hamami Nata, Korelasi Dampak Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Obat Berbahaya. Studi Tentang Kasus Narkotika di Jakarta, Makalah Seminar di IAIN Jakarta tanggal 2 Agustus 1997.
- H.M. Ridha Ma'ruf. 1986. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psykotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar maju: bandung.
- M.Marwan, Jimmy P.SH. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher: Surabaya
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Asd. Mahasatya: Jakarta
- O.C. Kaligis. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. PT. Alumni: Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia: jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung
- Perundang-undangan :**
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Solahuddin. 2009. *KUHP dan KUHP*. Trans Media: jakarta